

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii
Abstrak.....	vii
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Wakil Kepala Daerah oleh: <i>Riris Katharina</i>	1-18
MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat dan Dampak Politiknnya oleh: <i>Prayudi</i>	19-40
Tantangan Menghadapi Globalisasi: Belajar Dari Beberapa Negara oleh: <i>Indra Pahlevi</i>	41-57
<i>Illegal Fishing</i> di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya penanganannya Secara Bilateral di Kawasan oleh: <i>Simela Victor Muhamad</i>	59-85
Keamanan Sosial dan Keamanan Lingkungan di Pulau Terluar Indonesia: Studi Kabupaten Kepulauan Raja Ampat oleh: <i>Poltak Partogi Nainggolan</i>	87-109
<i>Inter-Parliamentary Union (IPU)</i> dan Lingkungan Hidup oleh: <i>Adirini Pujayanti</i>	111-133
<i>Arab Spring</i> dan Perebutan Pengaruh di Suriah oleh: <i>Humphrey Wangke</i>	135-161
Biodata Penulis dan Mitra Bestari	
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Politica merupakan jurnal ilmiah yang konsisten untuk menyajikan berbagai permasalahan strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Edisi pertama pada Tahun 2012 ini, *Jurnal Politica* menyajikan 7 (tujuh) tulisan yang merupakan hasil kajian di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Tulisan pertama berjudul “Pegawai Negeri Sipil Sebagai Wakil Kepala Daerah” ditulis oleh Riris Katharina. Pada edisi ini, penulis mengkaji gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah sebagaimana yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah pada tahun 2012. Penulis menyampaikan beberapa alasan penggagas untuk mengangkat PNS sebagai wakil kepala daerah tidak tepat. Gagasan tersebut belum jelas membedakan antara posisi wakil kepala daerah sebagai jabatan politik dengan sumber pengangkatannya, yaitu dari birokrasi. Penulis merekomendasikan agar sumber pengangkatan wakil kepala daerah dibuka baik dari kalangan partai politik maupun PNS, sepanjang dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

“MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat dan Dampak Politiknya” adalah judul tulisan kedua yang ditulis oleh Prayudi. Amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Transisi politik kedaulatan rakyat dicerminkan oleh pemilu sebagai agenda nasional. Hal tersebut memberikan dampak pada karakter pelaksanaan tugas dan wewenang MPR secara kelembagaan.

Indra Pahlevi menjadi penulis ketiga dalam jurnal ini, menyajikan tulisan dengan judul “Tantangan Menghadapi Globalisasi: Belajar dari Beberapa Negara”. Dampak dari proses globalisasi dan liberalisme yang melanda dunia dalam kurun waktu satu abad ini, krisis perekonomian yang kini terjadi di Eropa berpengaruh pada situasi perekonomian dunia. Posisi negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur menjadi lemah. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar

Indonesia belajar dari pengalaman negara India, Cina, Korea Selatan dan Taiwan dalam mengatasi dan mengelola krisis ekonomi tersebut.

“*Illegal Fishing* di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan” menjadi tulisan keempat dalam jurnal ini yang ditulis berdasarkan penelitian Simela Victor Muhamad. *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia sangat merugikan negara kita. Hal tersebut menjadi persoalan lintas negara oleh karena itu penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara lintas negara. Kerjasama bilateral yang lebih kuat harus dibangun dan dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini. Berdasarkan hasil penelitiannya penulis akan memaparkan solusi penanganan *illegal fishing* secara bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Tulisan kelima adalah hasil penelitian Poltak Partogi Nainggolan dengan judul “Keamanan Sosial dan Keamanan Lingkungan di Pulau Terluar Indonesia: Studi Kabupaten Kepulauan Raja Ampat”. Kepulauan Raja Ampat merupakan bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia yang rawan dari berbagai bentuk ancaman, terutama keamanan sosial dan keamanan lingkungan. Secara geopolitik dan geostrategis, potensi sumberdaya alam dan posisi Kepulauan Raja Ampat sangat penting bagi Indonesia Menurut penulis, untuk menjaga dan mempertahankan Raja Ampat studi atas keamanan sosial dan keamanan lingkungan harus segera dilakukan karena semakin meningkatnya ancaman keamanan dan kehadiran asing di sana.

Selanjutnya tulisan berjudul “*Inter Parliamentary Union (IPU)* dan Lingkungan Hidup” dengan penulis Adirini Pujayanti. Populasi penduduk dunia yang terus meningkat tanpa diikuti kemampuan bumi untuk menyediakan pangan dan sumberdaya agar manusia bisa hidup layak, telah menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Respon negara untuk mencegah degradasi lingkungan dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka. Diperlukan kerjasama internasional yang adil dan setara serta saling menguntungkan antar negara berkembang dan negara industri maju untuk mengatasi masalah ini. Inter Parliamentary Union merupakan satu organisasi parlemen internasional yang dapat menjadi sarana yang tepat bagi kerjasama menjaga kelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Tulisan terakhir adalah “*Arab Spring* dan Perebutan Pengaruh di Suriah” yang ditulis oleh Humphrey Wangke. Keberhasilan reformasi di Suriah ditentukan oleh peran yang dilakukan pihak eksternal. Hal ini disebabkan pihak-pihak yang bertikai di negara tersebut telah menggagalkan dukungan dari masyarakat internasional. Dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara

pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi secara damai semakin sulit tercapai.

Pada tataran konseptual, tulisan-tulisan dalam Jurnal ini diharapkan dapat menjembatani interaksi berbagai konsep dan teori dengan realitas yang terkait dengan masalah di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas keilmuan. Sedangkan pada tataran praktis, berbagai masalah, data, konsep dan teori serta analisis dalam tulisan-tulisan di Jurnal ini, diharapkan mampu menjadi referensi pelengkap bagi Anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta kepada masyarakat pada umumnya. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada DR Lili Romli, M.Si., peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan DR. Ganewati Wuryandari, MA, Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sebagai Mitra Bestari, atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam edisi ketiga Jurnal *Politica* ini.

Jakarta, Mei 2012

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Riris Katharina

Pegawai Negeri Sipil Sebagai Wakil Kepala Daerah

Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan dengan cara melihat alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalisis menurut teori administrasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa alasan yang dikemukakan penggagas tidak tepat diatasi dengan pengangkatan PNS sebagai wakil kepala daerah. Gagasan tersebut belum jelas membedakan antara posisi wakil kepala daerah sebagai jabatan politik dengan sumber pengangkatannya, yaitu dari birokrasi. Tulisan ini merekomendasikan sumber pengangkatan wakil kepala daerah dibuka baik dari kalangan partai politik maupun PNS, sepanjang dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata kunci: PNS, Wakil Kepala Daerah, birokrasi.

Riris Katharina

Civil Servant as Deputies Head of Region

Government's proposal to appoint civil servants as deputies head of region in bill on Regional Government, which will amend Law no. 32 year 2004, is important to be discussed. This essay discusses the proposal by examining reasons revealed by the government and analyzing it by applying the perspective of administrative discipline and theories. The writer comes to the conclusion that the reasons are not quite rights so that the proposal cannot consequently be wholly justified. The writer found that government's officials who propose or support the notion still cannot disconnect between the position of deputies head of region as political appointees with their sources of recruitment, namely, the bureaucracy, which is identical with the government. This essay, therefore, suggests that source of recruitment or appointment shall be not only from the bureaucracy but also from political parties as long as the candidates have good capability to conduct their tasks and duties.

Keywords: PNS, Indonesian civil servants, Indonesian bureaucracy, deputies head of region

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Prayudi

MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat dan Dampak Politikanya

Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak menjadi mediator perwakilan dari setiap utusan, tetapi dicerminkan oleh pemilu sebagai agenda nasional. Bagi MPR, transisi kedaulatan rakyat memberikan dampak pada karakter pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan.

Kata kunci: MPR, kedaulatan rakyat, lembaga negara, Presiden, DPR.

Prayudi

MPR, *Transfer of People Sovereignty and It's Political Impact*

Four times amendments of the 1945 Constitution has resulted in an MPR which is longer as the highest state institution, but as a common high state institution equal with others. This change has been made based on the argument that power sovereignty is upheld by the people and shall be performed in accordance with the amended 1945 State Constitution. This political situation a process of transition of power sovereignty since MPR members are not again appointed representatives but elected representatives, who are chosen in general elections. This transition causes the changes of MPR tasks, duties, and authorities as a high state institution.

Keywords: MPR, democratic transition, power sovereignty, people sovereignty

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Indra Pahlevi

Tantangan Menghadapi Globalisasi: Belajar Dari Beberapa Negara

Situasi perekonomian global saat ini tengah menghadapi masalah akibat krisis di Eropa. Namun kondisi tersebut belum separah kondisi akhir tahun 1990-an akibat krisis Asia terutama Indonesia. Situasi tersebut merupakan dampak dari proses globalisasi dan liberalisme yang melanda dunia dalam kurun waktu satu abad ini. Pertanyaannya, bagaimana posisi negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur (regulating)? Padahal selain sisi globalisasi yang memang tidak terbandung, tetap harus ada nasionalisme di setiap negara. Atas dasar itu perlu kiranya kita melihat pengalaman negara-negara di dunia dalam mengatasi dan mengelola krisis yang terjadi seperti di India, Cina, Korea, dan Taiwan. Indonesia bisa belajar dari pengalaman tersebut meskipun tidak harus persis sama, sebab setiap negara memiliki karakteristik masing-masing dan solusinya pun tidak selalu sama.

Kata Kunci: Globalisasi, negara, liberalisme

Indra Pahlevi

Globalitation Challenges: Serving from Other Countries Experiences

Current world economy is entering a new phase of crisis after it has begun in Europe. Nevertheless, this time the crisis is not as bad as the Asian crisis emerged in late 1990s. It is argued here that the crisis is an impact of unstoppable waves of globalization and liberalism across the world in the last century. It is then questioned by the writer how is the role of state as a regulating power in controlling that phenomenon. Aside from the reality that globalization cannot be stopped, the writer says that there is a need to safeguard and revive the notion of nationalism in order to limit the impact. The writer draws attention to learn from of countries' experience such as India, China, Korea, and Taiwan in coping with the issues of globalization, liberalism, and its impact. Indonesia can take good lessons from those countries without totally following their paths due to the reason hat every country has their own background or history, meaning that the crisis solution is not always the same.

Keywords: globalization, state power, nationalism, liberalism, economic crisis.

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Simela Victor Muhamad

Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan

Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun dan dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini. Tulisan hasil penelitian ini akan membahas perihal kegiatan dan penyebab terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia, dan bagaimana penanganannya secara bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: *Illegal Fishing*, Perairan Indonesia, Kerja Sama Bilateral, Asia Tenggara

Simela Victor Muhamad

Illegal Fishing in Indonesia's Waters: Problem and Bilateral Solutions in the Region

Illegal fishing still frequently occurs in Indonesian waters although many efforts have been conducted to stop it. Illegal fishing is not a typical problem Indonesia facing since it experienced also by other rich resource-countries due to its nature as a transnational crime. The writer therefore argues that the solution to overcome such transitional crime shall be done through a cross-national cooperation, including through a bilateral one. Although cooperation with neighboring countries have been conducted by Indonesia, multilateral- and bilaterally, however, all these still cannot secure the waters from illegal fishing. That is why a more serious and a better cooperation, in particular bilaterally, must be fostered by Indonesia's government to effectively counter such a transnational crime. This research report discusses illegal fishing in the Indonesian waters, its causes, and the ways to handle it so far in the region.

Keywords: *illegal fishing, Indonesian waters, bilateral cooperation, Southeast Asia.*

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

Keamanan Sosial dan Keamanan Lingkungan di Pulau Terluar Indonesia:
Studi Kabupaten Kepulauan Raja Ampat

Kepulauan Raja Ampat, kabupaten pemekaran baru, di Provinsi Papua Barat, merupakan bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia yang rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan, terutama keamanan sosial dan keamanan lingkungan. Karena, potensi sumberdaya alam dan posisinya yang sangat penting secara geopolitik dan geostrategis, khususnya sebagai wilayah konservasi terumbu karang dunia. Studi atas keamanan sosial dan keamanan lingkungan mendesak dilakukan mengingat berbagai kepentingan yang mengancam kepulauan itu, yakni meningkatnya kehadiran asing dan kondisi ancaman keamanan di sana. Studi ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak pada tahun 2011.

Kata Kunci: keamanan sosial, keamanan lingkungan, pulau terluar, Raja Ampat

Poltak Partogi Nainggolan

Social and Environment Security in Indonesia Outer Islands : Studies in Raja Ampat Archipelago

The Raja Ampat archipelago, a new municipality in West Papua Province, is one of Indonesia's outer islands, which is vulnerable from any from of security threats, especially social and environmental security because of its natural resources potentials -in particular its coral reefs- and important position from the aspects of geopolitics and geostrategy. A study from both security point of views is currently needed in time of the rising threats to the archipelago coming from the intensifying presence of foreign investors and visitors. This study is completed with field researches, interviews, and FGD with various parties conducted in 2011.

Keywords: social security, environmental security, outer islands, Raja Ampat

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Adirini Pujayanti

Inter Parliamentary Union (IPU) dan Lingkungan Hidup

Populasi penduduk dunia yang terus meningkat tanpa diikuti kemampuan bumi untuk menyediakan pangan dan sumberdaya agar manusia bisa hidup layak, telah menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Penulis berpendapat bahwa respon negara untuk mencegah degradasi lingkungan dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka. Dengan demikian, diperlukan kerjasama internasional yang adil dan setara serta saling menguntungkan antara negara berkembang dan negara industri maju untuk mengatasi masalah ini. Tulisan ini membahas upaya Inter Parliamentary (IPU) untuk melestarikan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam tulisan ini diketahui bahwa IPU sejak tahun 1992, telah memperkenalkan sebuah inisiatif yang difokuskan pada persiapan dan petunjuk pelaksana untuk melindungi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, berbasis rekomendasi UNCED. Namun efektifitas dari solusi IPU telah dipertanyakan karena keterbatasan kemampuannya dalam penerapan.

Kata Kunci : IPU,Isu lingkungan, degradasi lingkungan

Adirini Pujayanti

Inter-Parliamentary Union (IPU) and Environment Issues

A fast increase of world population without being followed by the world capability to provide food and other basic needs is a cause of global environmental degradation. The writer argues that countries response to further prevent this degradation influenced by their national interests, thus, an equal and a fair international cooperation which gives mutual benefits to developing and industrial countries is needed. This essay discusses Inter-Parliamentary Cooperation (IPU) to preserve environment within the framework of sustainable development. It is found here that the IPU, since 1992, has been introducing an initiative focused on the preparation and implementation guidance on protecting the environment and sustainable development based on United Nations Conference on Environment and Development (UNCED's) UNCED's recommendations. However, the effectiveness of the IPU solution has been questioned due to its limited capability in implementing this.

Keywords: IPU, environmental issue, environmental degradation

Kata Kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Humphrey Wangke

Arab Spring dan Perebutan Pengaruh di Suriah

Makalah ini membahas tentang demonstrasi di Suriah yang menuntut pergantian pemerintahan agar lebih demokratis. Dengan menggunakan teori permainan atau *Game Theory*, penulis berpendapat bahwa keberhasilan reformasi di Suriah akan sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan pihak eksternal sebab pihak-pihak yang bertikai di negara itu, baik pemerintah maupun oposisi, telah menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi secara damai semakin sulit tercapai.

Kata kunci: *Arab Spring*, transisi demokrasi, Liga Arab, PBB, *Middle East Exceptionalism*, *Game Theory*

Humphrey Wangke

Arab Spring and Struggle for Influence in Suriah

This essay discusses waves of mass-demonstration recently in Suriah which cries for a democratic regime change in that country. Applying the game theory, the writer argues that the success of political reform there will be determined by the role of external powers due to the reason that all conflicting parties have organized international supports. Such support will sharpen existing different perceptions between the repressive government and democratic forces or the opposition groups. Thus, it says here that a peaceful democratic transition will be more difficult to be reached.

Keywords: *Arab Spring*, *Arab league*, UN, MENA, *democratic transition*, *game theory*, *Middle East Exceptionalism*

